

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DALAM BUKU SISWA SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
MADRASAH ALIYAH KELAS X KURIKULUM 2013
(Telaah Atas Piagam Madinah)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Pendidikan

Oleh:

PRATIKA NUR ZIATIN

NIM. 13410168

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pratika Nur Ziatin

NIM : 13410168

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika ternyata di kemudian hari terbukti plagiasi maka kami bersedia untuk ditinjau kembali hak kesarjanaannya.

Yogyakarta, 09 Mei 2017



g menyatakan

Pratika Nur Ziatin

NIM. 13410168

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pratika Nur Ziatin
NIM : 13410168
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

menggunakan jilbab dalam ijazah, sehingga saya tidak akan menuntut kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga apabila di kemudian hari ada sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut.

Yogyakarta, 09 Mei 2017



g menyatakan

Pratika Nur Ziatin

NIM. 13410168

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp. : 3 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Pratika Nur Ziatin
NIM : 13410168
Judul Skripsi : Nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X Kurikulum 2013

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Mei 2017

Pembimbing



Drs. H. Rofik, M.Ag.

NIP.19650405 199303 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : B-105/Un.02/DT/PP.05.3/7/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DALAM BUKU SISWA SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
MADRASAH ALIYAH KELAS X KURIKULUM 2013
(Telaah atas Piagam Madinah)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Pratika Nur Ziatin

NIM : 13410168

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Rabu tanggal 7 Juni 2017

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Drs. H. Rofik, M.Ag.
NIP. 19650405 199303 1 002

Penguji I



Dr. Sabarudin, M.Si.
NIP. 19680405 199403 1 003

Penguji II



Drs. Nur Hamidi, MA
NIP. 19560812 198103 1 004

Yogyakarta, **2 JUL 2017**

Dekan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga



Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
NIP. 19661121 199203 1 002

MOTTO

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي رضي الله عنه فقال - كن في الدنيا كأنك غريب , أو عابر سبيل - وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لمماتك " رواه البخاري

Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, ia berkata : "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam memegang pundakku, lalu bersabda : Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhumanya berkata : "Jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit dan waktu hidupmu sebelum kamu mati".

[HR. Bukhari no. 6416]¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (ed), *Syarah Hadits Arba'in Imam An Nawawi*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013), hal. 509

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan untuk:

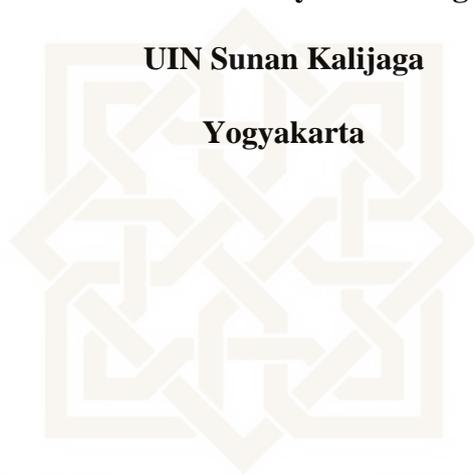
Almamater Tercinta,

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Saw yang telah menuntun manusia ke jalan penuh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian mengenai nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan yang terkandung di dalam *Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X Kurikulum 2013*. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus hati pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

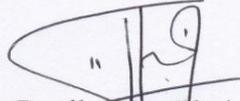
1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Rofik, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi yang senantiasa dengan sabar, teliti, dan kritis telah bersedia memberi masukan, bimbingan, serta pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Yuli Kuswandari, M.Hum. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada seluruh keluarga, ayahanda tercinta Bapak Prayitno, ibunda tercinta Ibu Mujiatin, serta adek-adekku sayang Winda Astuti dan Adi Pramana Putra, yang selalu menjadi motivator dan ikhlas memberi dorongan serta doa kepada penulis.
7. *My Beloved*, Yogi Rinda Saputra yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis serta telah bersabar untuk selalu mengingatkan penulis.
8. Teman seperjuangan Mei, Fera, Hesti, Yusti, Endah, dan seluruh keluarga besar PAI E 2013 yang telah menjadi keluarga kedua di perantauan.
9. Keluarga besar Magang 3, KKN 91 Dusun Patuk dan Kost Pink House, Mbak Nanda, Mbak Nana, Wilda, Wisang, Ade, Hani, Fatkur dan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menemani dan terus memotivasi dalam menuntut ilmu.

Penulis juga mohon maaf karena dalam skripsi ini tentu masih banyak kekurangan bahkan kesalahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi perbaikan karya-karya lain di kemudian hari.

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Penyusun


Pratika Nur Ziatin
13410168

ABSTRAK

PRATIKA NUR ZIATIN *Nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X Kurikulum 2013*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Latar belakang masalah penelitian ini adalah dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam sarat akan nilai kewarganegaraan yang dapat diambil. Nilai kewarganegaraan merupakan suatu hal yang sangat penting. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bagian dari pendidikan politik secara formal yang diajarkan di sekolah/madrasah. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan nasional mengambil fokus mengenai demokrasi politik. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjawab tantangan global yang terus menggerogoti eksistensi suatu negara di era yang modern ini. Dengan ini, melalui Sejarah Kebudayaan Islam dapat diambil pelajaran dari nilai-nilai yang diteladankan Rasulullah, khususnya nilai kewarganegaraan yang termanifestasi dalam konstitusi yang berlaku pada waktu itu. Sejatinya bahan ajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ini dapat digunakan sebagai salah satu media dalam meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai kewarganegaraan yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Adapun dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dengan mencari data yang relevan pada buku, artikel, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nilai kewarganegaraan. Sedangkan dalam analisis datanya menggunakan *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan dari suatu teks secara sistematis dan objektif.

Hasil penelitian terhadap Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X adalah: Terdapat nilai kewarganegaraan dalam Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X Kurikulum 2013 yaitu: nilai religius, nilai musyawarah, nilai keadilan, nilai persamaan, nilai kekeluargaan, nilai persatuan dan persaudaraan, nilai kebebasan, nilai pertahanan dan keamanan, nilai perdamaian, nilai kepemimpinan, nilai kesejahteraan, nilai tolong-menolong dan membela yang lemah, nilai penegakan hukum, dan nilai kejujuran. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari hasil analisis terhadap isi teks Piagam Madinah yang sarat akan nilai kewarganegaraan guna menjawab patologi sosial yang berkembang saat ini. Secara keseluruhan, nilai-nilai tersebut sudah ada di dalam Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X Kurikulum 2013 yang sejatinya dalam Sejarah Kebudayaan Islam banyak hikmah/pelajaran yang dapat diambil untuk kehidupan saat ini dan yang akan datang. Buku tersebut menjelaskan cukup komprehensif materi yang sarat akan nilai-nilai kewarganegaraan, namun kekurangannya dalam penyusunan materi menggunakan bahasa yang kurang baku dan sebagian belum menggunakan ejaan yang baik sesuai EYD yang ada. Sehingga, mempengaruhi peserta didik dalam memahami pesan nilai yang disampaikan oleh buku tersebut.

Kata kunci: nilai-nilai kewarganegaraan, buku siswa, Sejarah Kebudayaan Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Landasan Teori	13
F. Metode Penelitian	33
G. Sistematika Pembahasan	38
BAB II : PERAN MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DALAM KURIKULUM MADRASAH ALIYAH.....	40
A. Posisi Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.....	40
B. Karakteristik Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam	41
C. Tujuan Dan Ruang Lingkup Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam	44
D. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X.....	47
E. Peranan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X.....	55
F. Deskripsi Materi-Materi Dalam Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X.....	57
G. Kesimpulan Terhadap Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X	62
BAB III : NILAI-NILAI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM BUKU SISWA SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM MADRASAH ALIYAH KELAS X.....	64
A. Nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Piagam Madinah.....	69
B. Analisis Nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X	83
1. Nilai Religius.....	84

2. Nilai Musyawarah	90
3. Nilai Keadilan.....	97
4. Nilai Persamaan.....	99
5. Nilai Kekeluargaan.....	101
6. Nilai Persatuan dan Persaudaraan	107
7. Nilai Kebebasan.....	109
8. Nilai Pertahanan dan Keamanan	113
9. Nilai Perdamaian	120
10. Nilai Kepemimpinan	123
11. Nilai Kesejahteraan	130
12. Nilai Tolong-menolong dan Membela Yang Lemah.....	133
13. Nilai Penegakan Hukum.....	136
14. Nilai Kejujuran	139
C. Kesimpulan Terhadap Isi Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X.....	142
 BAB IV : PENUTUP.....	148
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran.....	151
C. Kata Penutup	152
 DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	158

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	T	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Er
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Untuk bacaan panjang ditambah:

أ = ā

إى = ī

أو = ū

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X
- Lampiran II : Fotokopi Bukti Seminar Proposal
- Lampiran III : Fotokopi Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran IV : Fotokopi Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran V : Fotokopi Sertifikat SOSPEM
- Lampiran VI : Fotokopi Sertifikat Magang II
- Lampiran VII : Fotokopi Sertifikat Magang III
- Lampiran VIII : Fotokopi Sertifikat KKN
- Lampiran IX : Fotokopi Sertifikat TOAFL
- Lampiran X : Fotokopi Sertifikat TOEFL
- Lampiran XI : Fotokopi Sertifikat ICT
- Lampiran XII : Daftar Riwayat Hidup Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, globalisasi telah melanda dunia. Hal ini ditandai dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan dunia menjadi transparan dan seolah menjadi “kampung besar” tanpa mengenal batas-batas negara. Akibatnya, pengaruh lembaga-lembaga internasional terhadap negara-negara di dunia semakin besar. Selain itu, pengaruh negara-negara maju juga sangat dominan dalam mengatur percaturan perpolitikan, perekonomian, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global, seperti Amerika, Inggris, Jerman, Jepang, Cina dan lain-lain. Sehingga konflik antar negara berakibat negara di dunia menjadi terkotak-kotak atau membentuk blok yang didasarkan pada kepentingan masing-masing, meskipun dunia telah menjadi kampung besar yang tidak lagi mengenal batas-batas negara.¹

Kondisi di atas pada hakikatnya telah menciptakan struktur baru, yaitu struktur global yang sangat memengaruhi pola pikir dan mentalitas negara. Akibatnya, identitas asli masing-masing negara menjadi memudar, bahkan bisa hilang. Akibat yang langsung terlihat yaitu terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa karena adanya benturan-benturan antar kepentingan antara nasionalisme dan internasionalisme. Kondisi ini harus disikapi dengan bijaksana, khususnya melalui

¹ Budi Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 2

pendidikan dan pengajaran kepada generasi muda. Di sini, peran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kembali membangun rasa nasionalisme setiap warga negara.²

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia sejak era pra penjajahan hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai perkembangan zaman. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut seharusnya mampu ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Namun, permasalahan yang dihadapi yaitu nilai-nilai perjuangan itu kini telah mengalami fluktuasi sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis, seperti menipisnya nilai-nilai dasar ke-Indonesiaan (seperti nilai dasar ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi/musyawarah, dan nilai keadilan).³

Hal ini bisa menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal, sehingga dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Konflik vertikal yaitu konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Contohnya yaitu adanya gejolak kedaerahan berupa tuntutan untuk memisahkan diri dari negara NKRI. Konflik tersebut merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan di

² *Ibid.*, hal. 2

³ *Ibid.*, hal. 3

daerah. Sedangkan konflik horizontal yaitu konflik antar warga masyarakat atau antar kelompok dalam masyarakat. Contohnya yaitu konflik yang berlatar belakang keagamaan, kesukuan, antar kelompok atau golongan semacamnya yang muncul dalam bentuk kerusuhan, perang antar suku, pembakaran rumah-rumah ibadah, dan sebagainya. Dalam hal ini seperti kasus yang terjadi di Lombok dan di Poso.⁴

Kondisi ini harus disikapi dengan perjuangan non-fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Perjuangan non-fisik ini memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara pada umumnya dan mahasiswa sebagai cendekiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki nasionalisme terhadap bangsa dan negara, seperti Indonesia.⁵

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian utuh dari sistem Pendidikan Nasional. Secara tegas dijelaskan dalam pasal 37 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa "... pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air." Yang dimaksudkan, Pendidikan Kewarganegaraan mencakup substansi dan proses pendidikan nilai ideologis Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan pada pendidikan kewajiban dan hak warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan

⁴ Edukasi PPKn, "Integrasi Nasional", www.edukasippkn.com dalam google.com, 2016, diakses pada 15 Januari 2017 pukul 22.32 WIB

⁵ Budi Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 3

salah satu bentuk pendidikan karakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik. Dalam konteks itu, pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari kerangka kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter.⁶

Pendidikan Kewarganegaraan secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dalam seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Saat ini, Pendidikan Kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi Pendidikan Nasional Indonesia dalam lima status, yaitu (1) sebagai mata pelajaran di sekolah, (2) sebagai mata kuliah di Perguruan Tinggi, (3) sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru, (4) sebagai program pendidikan politik, dan (5) sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individu dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai Pendidikan Kewarganegaraan.⁷

Sebagai bidang studi ilmiah, Pendidikan Kewarganegaraan bersifat antar disiplin (antar bidang), bukan mono-disipliner. Karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu Pendidikan Kewarganegaraan diambil dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, upaya pembahasan dan pengembangannya memerlukan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu yang lain, yang meliputi ilmu politik, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu

⁶ Draf Dikti-MKWU, *Pedoman Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)*, (Jakarta: Dirjen Dikti, 2014), hal. 1-2

⁷ Budi Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 2

sosiologi, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa, dan ilmu budaya.⁸

Berkaitan dengan hal di atas, peneliti mencoba mengkaji nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan yang terkandung dalam buku teks pelajaran, yaitu buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah, khususnya kelas X. Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.⁹ Karena adanya Pendidikan Kewarganegaraan tidak terlepas dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa, yang dalam hal ini dikaji dari sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan *Khulafaur Rasyidin*. Keterkaitan antara keduanya dapat dilihat dari penekanannya yaitu Sejarah Kebudayaan Islam menekankan pada kemampuan mengambil ibrah/ hikmah dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain, untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan masa yang akan datang.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hal 10

⁹ *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Buku Teks Pelajaran*, (Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2005), hal. 2

¹⁰ *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2676 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2013), edisi revisi 16 Juni 2014, hal. 44

Islam merupakan ajaran yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dalam hubungan manusia dengan manusia, alam dan Allah SWT sebagai penciptanya. Dalam kesadarannya, manusia hendaknya memahami hakekat hidupnya sebagai manusia dalam memutuskan pandangan dan tujuan hidupnya sebagai hamba Allah secara universal. Islam merupakan agama yang haq dan diridhoi oleh Allah, diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang dipilih sebagai rasul yang terakhir. Ajaran dan petunjuk tersebut terhimpun di dalam Al-Qur'an secara lengkap dan sempurna, sebagaimana yang tercantum di dalam QS. Al-Imran ayat 138 sebagai berikut:¹¹

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

Artinya: “(Al Quran) Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.”

Rasulullah SAW sebagai sosok manusia yang sempurna.

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 21 berikut ini:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Yang berarti “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*”.

Rasulullah menjadi teladan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan

¹¹ Hadari Nawawi, *Pendidikan Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hal. 13-15

lain-lain. Sehingga contoh yang baik berada dalam diri Rasulullah yang dapat kita kaji melalui sejarah perjalanan hidupnya.

Sejarah pemerintahan di mulai dari berdirinya negara Islam pertama di bumi dan Rasulullah adalah kepala negaranya yang pertama. Perjanjiannya dengan kaum Yahudi merupakan sebagian manifestasi kekuasaan politik yang mulai melekat dengan sifatnya sebagai kepala negara sebuah negara Islam yang tumbuh di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Anshor dan Muhajirin serta membiarkan orang Yahudi tetap dengan agama dan harta mereka melalui Piagam Madinah yang kemudian ditetapkan sebagai konstitusi.¹²

Dari penjelasan di atas, peneliti merasa bahwa penting untuk diketahui adanya nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan politik di sekolah dalam Sejarah Kebudayaan Islam. Hal ini berkaitan dengan pengembangan gagasan/wawasan terhadap eksistensi suatu negara dengan bercermin pada Sejarah Islam yang telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Tentunya, hal ini dilakukan melalui pembelajaran di sekolah maupun madrasah. Tujuannya agar dalam pembelajaran dapat menanamkan sikap sosial politik sebagai warga negara yang baik dengan mengetahui hak dan kewajiban terhadap sesama dan negara melalui pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.

¹² Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984), hal.8-9

Sehingga dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengambil fokus penelitian tentang Nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas X Kurikulum 2013. Buku tersebut merupakan buku yang disusun oleh pemerintah yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, fokus masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam Sejarah Kebudayaan Islam dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam kurikulum Madrasah Aliyah Kelas X Kurikulum 2013?
2. Bagaimana kandungan nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X Kurikulum 2013?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam kurikulum Madrasah Aliyah Kelas X Kurikulum 2013.

- b. Untuk mengetahui kandungan nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X kurikulum 2013.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

- 1) Dapat menambah wawasan keilmuan terutama dalam memahami konsep Pendidikan Kewarganegaraan dalam SKI.
- 2) Dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pengembangan materi Pendidikan Agama Islam dengan bertolak kepada Pendidikan Kewarganegaraan melalui Sejarah Kebudayaan Islam.

b. Kegunaan praktis

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan melengkapi gagasan Pendidikan Kewarganegaraan pada masa Rasulullah melalui Sejarah Kebudayaan Islam.
- 2) Sebagai bahan rujukan berbagai pihak untuk memberikan dan mengembangkan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan sejak dini.
- 3) Sebagai bahan rujukan bahwa Sejarah Kebudayaan Islam melengkapi keilmuan tentang kewarganegaraan yang harus dipahami oleh generasi muda, terlebih mengenai identitas kita yang berkewarganegaraan Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian kepustakaan ini, peneliti mencoba menggali dan memahami beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dianggap penting untuk memperkaya referensi dan menambah wawasan terkait dengan judul pada skripsi peneliti. Selain itu, hal ini juga berfungsi sebagai argumen dan bukti bahwa skripsi yang dibahas oleh peneliti masih terjamin keasliannya. Di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada umumnya dan Jurusan Pendidikan Agama Islam pada khususnya belum terdapat penelitian yang membahas secara spesifik tentang nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dan dalam materi Pendidikan Agama Islam, khususnya Sejarah Kebudayaan Islam.

Berikut beberapa hasil pencarian peneliti tentang penelitian skripsi yang membahas kewarganegaraan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, diantaranya adalah:

1. Skripsi saudara Eka Prasetya, dengan judul “Pendidikan Politik Dalam Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Kelas X Kurikulum 2013”, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Kalijaga Fakultas Tarbiyah 2015. Hasil dari skripsi ini adalah adanya pendidikan politik yang terdapat di dalam buku siswa SKI kelas X, yaitu pada bab kedua dan ketiga mengenai rasa kesadaran berideologi dan bernegara bangsa, motivasi berprestasi, kepercayaan pada kesamaan hak, keadilan sosial pada penghormatan atas harkat dan martabat manusia, dan disiplin sosial, rasa kemampuan politik dan

kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan menyatakan keinginannya dalam politik, kepercayaan pada pemerintah, dan kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan. Kelebihan dari skripsi ini adalah mampu membahas cukup komprehensif mengenai buku siswa SKI MA dengan sudut pandang pendidikan politik dalam dakwah Rasulullah dan mampu merelevansikan politik tersebut dengan PAI. Namun dalam penelitian tersebut belum cukup membahas mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari program pendidikan politik yang terintegrasi dalam Sejarah Kebudayaan Islam.

2. Skripsi Ahmad Danuji, dengan judul “Pemikiran Wahid Hasyim Tentang Islam Dan Kewargaan”, Yogyakarta: Jurusan Jinayah Siyasah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum 2014. Skripsi ini berisi tentang pemikiran Wahid Hasyim berhubungan dengan komunitasnya untuk membangun pemikiran adanya kesetaraan diantara warga negara yang memiliki kedudukan sama dalam menentukan kebijakan politik. Secara substansial, negara harus memberikan ruang bagi warga negara untuk mendapatkan hak-haknya. Hal ini terjadi pada waktu itu adanya polemik diantara tokoh bangsa dalam merumuskan dasar negara berupa Piagam Jakarta. Dalam penelitian ini belum cukup memberikan kontribusi keilmuan terkait hak dan kewajiban warga negara terhadap negara dan antar

warga negara serta pembelaan terhadap negara dikaitkan dengan konsep Pendidikan Agama Islam.

3. Skripsi Bestiana Nizhomi, dengan judul “Integrasi *General Life Skill* dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V Di MIN Jejeran Bantul Yogyakarta”, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Sunan Kalijaga Fakultas Tarbiyah 2014. Hasil dari skripsi ini adalah integrasi kecakapan hidup dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Fokus penelitiannya mengacu pada tahap pelaksanaan penyusunan RPP dan kegiatan pembelajaran di kelas meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari skripsi tersebut belum membahas secara terperinci mengenai keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari program pendidikan politik dalam sejarah Nabi Muhammad SAW dan *Khulafaur Rasyidin* dengan Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian membuktikan bahwa penelitian ini original dan bukan merupakan hasil dari praktek plagiasi. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam pendidikan yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Agama Islam.

E. Landasan Teori

1. Nilai

Persoalan nilai menjadi hal yang mendasar dan penting. Di dalam proses pendidikan merupakan bentuk pengoperasian nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan apa yang hendak dicapai. Hal ini bisa dilihat dalam kurikulum dan tujuan pendidikan yang ada.¹³ Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Kniker bahwa nilai merupakan istilah yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Nilai ditempatkan sebagai inti dari proses dan tujuan pembelajaran, serta disetiap huruf yang terkandung dalam kata *value* dirasionalkan sebagai tindakan-tindakan pendidikan.¹⁴

Nilai (*value*) dalam pandangan Brubacher tak terbatas ruang lingkungannya. Nilai sangat erat dengan pengertian dan aktivitas manusia yang kompleks. Berikut merupakan beberapa pengertian tentang nilai yaitu:¹⁵

- a. Dalam Encyclopedi Britannica dikatakan bahwa nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas objek yang menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat.
- b. Menurut Young, nilai diartikan sebagai asumsi-asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang hal-hal yang benar dan hal-hal yang penting.
- c. Menurut Green, nilai dipandang sebagai kesadaran yang secara relatif berlangsung dengan disertai emosi terhadap objek, ide, dan perseorangan.

¹³ Muhammad Zain, *Pendidikan Islam Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1987), hal. 67

¹⁴ Maksudin, *Pendidikan Nilai Komprehensif: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2009), hal. 2

¹⁵ Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hal. 109-110

- d. Menurut Woods, yang menyatakan bahwa nilai merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Menurut Bertens, nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan. Singkatnya, nilai ialah sesuatu yang baik.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang abstrak, ideal dan tidak dapat disentuh oleh panca indera yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk tindakan-tindakan yang dianggap baik/buruk dan benar/salah. Nilai adalah konsepsi-konsepsi yang abstrak di dalam diri manusia atau masyarakat, mengenai hal yang baik, benar, dan hal yang dianggap buruk dan salah.

Objek nilai berupa tindakan, benda, hal, fakta, dan peristiwa termasuk didalamnya norma, serta berorientasi pada kebermaknaan nilai menurut pertimbangan manusia (nilai kemanusiaan).¹⁷ Macam-macam nilai yang dihubungkan dengan materi pelajaran atau kurikulum secara umum adalah nilai materiel, nilai formal, nilai instrumental, nilai subyektif dan nilai objektif.¹⁸ Demikian nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sebagai berikut¹⁹:

¹⁶ Maksudin, *Pendidikan Nilai Komprehensif*, hal. 1

¹⁷ *Ibid.*, hal. 5

¹⁸ Muhammad Zain, *Pendidikan Islam Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1987), hal. 69-70

¹⁹ Rofik, "Nilai Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Dalam Kurikulum Madrasah", dalam *jurnal Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. XII No. 1, (Juni, 2015), hal. 25-27

- a. Nilai material yaitu nilai yang melekat pada substansi materi pelajaran. Dalam kurikulum 2013, dikenal materi pokok dan materi pembelajaran melalui buku pelajaran. Materi pokok adalah materi yang muncul dari rumusan KD pada KI-3 sebagai ranah kognitif. Contohnya, rumusan KD sebagai berikut, “Memahami Substansi dan Strategi Dakwah Rasulullah di Mekkah”, maka dapat diperoleh materi pokok, “Substansi dan Strategi Dakwah Rasulullah di Mekkah”. Maka dari materi tersebut akan memunculkan sejumlah materi pembelajaran seperti “strategi, substansi, reaksi komunitas Quraisy atas strategi Rasulullah, Perjanjian Hudaibiyah antara komunitas muslim dengan komunitas non muslim.” Dengan demikian, materi apa yang akan dipelajari oleh siswa merupakan materi materialnya yang dapat dirujuk pada buku teks pelajaran atau buku siswa dalam bahasa kurikulum 2013.
- b. Nilai formal yaitu pemahaman siswa atas materi yang dipelajari. Nilai formal adalah nilai yang muncul sebagai akibat pemahaman siswa atas materi pembelajaran sebagai nilai material yang dipergunakan dalam pembelajaran. Ketika proses pembelajaran berlangsung, jika siswa menemukan pemahaman atas materi yang dipelajarinya sehingga mendapatkan kesimpulan, maka saat itu pula ia menemukan nilai formal.
- c. Nilai fungsional adalah nilai yang menunjukkan kepada berfungsinya materi pelajaran yang telah difahami (nilai formal) dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Nilai esensial, yaitu nilai yang berhubungan dengan kehidupan *post* duniawi. Ia bersifat *ukhrawi*, artinya bahwa nilai fungsional yang sudah tertanam dalam diri siswa dan diimplementasikan dalam keseharian pada gilirannya mampu menghantarkan dirinya dalam kehidupan akhirat.

Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan dan nilai mempunyai hubungan yang erat dengan sikap (*attitude*). Sehingga nilai-nilai tersebut dapat diambil dari sejarah yang sarat akan hikmah/pelajaran penting untuk dijadikan cerminan di kehidupan berikutnya. Dalam SKI terdapat nilai material, formal, fungsional dan esensial. Oleh karena itu, memiliki nilai material dan paham nilai formal akan lebih

bermakna jika disertai dengan nilai fungsional dan nilai esensial dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.²⁰

2. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewargaan (*civic education*) bukan merupakan sesuatu yang baru muncul di muka bumi. Proses globalisasi yang melanda dunia sepanjang dekade akhir abad ke-20 mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru tentang pendidikan kewargaan berbagai negara di dunia. Di Amerika, pada tahun 1994, untuk pertama kalinya standar kurikulum nasional pendidikan sipil disusun. Dewan Eropa juga memprakarsai proyek demokratisasi untuk menopang pengembangan kurikulum pendidikan kewargaan. Kecenderungan serupa juga berlangsung di negara-negara Australia, Kanada, Jepang dan negara-negara Asia lainnya.²¹

a. Munculnya Kewarganegaraan

Konsep kewarganegaraan mulai menjadi perdebatan kembali dikalangan ilmuwan sosial dan politik di Eropa era 90-an. Menurut Kymlicka, munculnya kembali gairah untuk mempelajari teori-teori kewarganegaraan itu dipicu oleh gerakan dalam ilmu sosial untuk membahas kembali soal-soal etis mengenai keadilan, persamaan dan kebebasan. Sementara itu, Bryan S. Turner mengatakan bahwa perubahan struktur sosial terutama dalam masyarakat Eropa telah mengangkat kembali

²⁰ *Ibid.*, hal. 28

²¹ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 11

persoalan kewarganegaraan, meskipun konsep ini sudah pernah muncul pada masa pasca Perang Dunia II terkait isu negara kesejahteraan Eropa.²²

b. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan sering disebut dengan istilah *civic (s)* dan *citizenship*. Istilah *civics* digunakan pertama kali oleh Chreshore pada tahun 1886. *Civics* diterjemahkan sebagai ilmu kewarganegaraan yang isinya antara lain mempelajari hubungan antar warga negara dan hubungan antara warga dan negara.²³

Sebagai sebuah ilmu, memiliki objek kajian yang jelas yaitu objek material dan formal. Objek kajian material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu, yaitu segala hal yang berkaitan dengan warga negara yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek materialnya, yaitu: segi hubungan antara warga negara dan negara (termasuk hubungan antar warga negara) dan segi pembelaan negara.²⁴

Secara terminologis, *civics* adalah suatu studi yang berkaitan dengan tugas pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara. Dalam *Dictionary of Education* dijelaskan bahwa *civics*

²² Robertus Robet dan Hendrik Boli Tobi, *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan: Dari Marx Sampai Agamben*, (Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 2014), hal. 1-2

²³ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal. 1

²⁴ Budi Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 9

adalah unsur dari ilmu politik yang berisi hak dan kewajiban warga negara. Sebagai ilmu politik, *civics* mengambil fokus studinya yaitu demokrasi politik.²⁵

Secara etimologis, *civics* (bahasa Latin) pada masa Romawi yaitu kata *civis*, *civicus* atau *civitas*, yang diartikan sebagai anggota atau warga suatu republik di zaman Romawi, sedangkan di zaman Yunani Athena diistilahkan *polites*, yaitu anggota dari *polis* (negara kota). *Civic* (bahasa Perancis) menjadi *citoyen*, dan dalam bahasa Inggris menjadi *citizen* yang artinya warga.

Citizenship pada umumnya diterjemahkan dengan kewarganegaraan, yang tidak bisa dipisahkan dari konsep *civis* atau *citizen*. Kewarganegaraan berarti seperangkat karakter warga negara, yang menunjukkan keanggotaan dalam komunitas politik. Dimana membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh disebut sebagai *citizen*.²⁶

Roger M. Smith mengidentifikasi 4 makna kewarganegaraan. Pertama, sebagai hak, yaitu hak politik untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Kedua, sebagai status hukum, yang secara sah diakui sebagai anggota dari komunitas politik (negara) yang berdaulat. Ketiga, keanggotaan dari suatu komunitas, kewarganegaraan menunjuk pada asosiasi/keterikatan

²⁵ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 2

²⁶ *Ibid.*, hal. 2

orang tidak hanya pada negara, tetapi juga komunitas lain (seperti keluarga, universitas, dan komunitas politik yang lebih luas lagi). Dan keempat, seperangkat tindakan, artinya kewarganegaraan tidak hanya mengimplikasikan adanya keanggotaan, tetapi juga ketentuan dan perilaku warga negara. Oleh karena itu, menjadi warga negara memerlukan *an aducational activity*, dalam konteks inilah *civic education* atau *citizenship education* diperlukan.²⁷

c. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) merupakan program pendidikan yang materi pokoknya adalah demokrasi politik yang ditujukan kepada peserta didik atau warga negara yang bersangkutan, yang dinyatakan sebagai upaya menerapkan *civics* (Ilmu Kewarganegaraan) dalam proses pendidikan.

John J. Cogan membedakan istilah pendidikan kewarganegaraan dalam dua pengertian. *Civic education* adalah pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sempit, yaitu sebagai bentuk pendidikan formal, seperti mata pelajaran, mata kuliah, atau kursus di lembaga sekolah, universitas atau lembaga formal lain. Sedangkan *citizenship education* adalah pengertian pendidikan kewarganegaraan yang lebih umum dan luas, yaitu mencakup pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan formal dan di luar sekolah baik berupa program

²⁷ *Ibid.*, hal. 3-4

penataran atau program lainnya yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai negara yang cerdas dan baik. Hal ini juga dijelaskan oleh David Kerr bahwa *citizenship education* sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga muda akan hak-hak, peran, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sedangkan *civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui sekolah.²⁸

Pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar bangsa dan negara untuk memberikan pengetahuan mengenai hubungan antara konsep-konsep dalam paradigma negara kepada seluruh warga negara.²⁹ Ada beberapa pengertian yang menjelaskan pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut:

- 1) Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003, pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga/ negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.³⁰
- 2) Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat agar mampu berpikir kritis

²⁸ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*., hal. 4-5

²⁹ Aryaning Arya Kresna, dkk, *Etika dan Tertib*, hal. 2

³⁰ Wirman Burhan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 31

dan bertindak demokratis melalui aktifitas penanaman kepada generasi muda tentang demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.

- 3) Menurut Azra, Pendidikan Kewargaan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal.

Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan pada pembinaan sikap dan kemampuan bela negara yang ditekankan pada aspek kognitif dan sikap. Jadi, berbeda dengan wajib latih (Wala) yang lebih ditekankan pada aspek fisik.

Menurut Somantri, Pendidikan Kewarganegaraan ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut³¹:

- 1) *Civic education* adalah kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah.
- 2) *Civic education* meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis.
- 3) Dalam *civic education* termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi, dan syarat-syarat obyektif untuk hidup bernegara.

³¹ Ubaedillah& Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal. 15

Dengan kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif dari komponen *Civic Education* di atas melalui model pembelajaran yang interaktif dan humanis dalam lingkungan yang demokratis.

d. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan

Esensi pendidikan kewarganegaraan diarahkan sebagai pendidikan demokrasi untuk membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab serta sekaligus dalam upaya untuk menjadikan warga yang baik dan demokratis.³² Pada pasal 37 (2) dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pada pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sangat jelas bahwa Pendidikan Kewarganegaraan wajib diberikan di sekolah mulai dari Pendidikan Dasar, Menengah hingga Perguruan Tinggi.³³

Pesatnya perkembangan tentang kebijakan pendidikan khususnya berkaitan dengan pengembangan pendidikan kewargaan sebagai respon terhadap perubahan-perubahan masyarakat di tingkat lokal dan global, menuntut bangsa-bangsa

³² Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal. 7

³³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

di dunia untuk melakukan adaptasi kembali terhadap tuntutan lingkungan yang terus bergerak dan berubah cepat. Hasil penelitian para ahli pendidikan memberikan gambaran yang beragam dalam operasionalisasi pendidikan kewargaan di masing-masing negara.

Di Australia, misalnya program pendidikan kewargaan yang diberlakukan ialah *discovering democracy* (pendidikan tentang masyarakat, sejarah dan geografi) yang masuk menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Sementara Hongkong menerapkan pendidikan kewargaan sebagai mata pelajaran pilihan dalam bentuk ekstrakurikuler, papan *display*, dan diskusi di tingkat sekolah. Jepang menerapkan pendidikan moral atau agama dan ilmu sosial sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Taiwan juga memberlakukan mata pelajaran sejarah, politik, ekonomi, dan masyarakat serta kewarganegaraan dan moralitas sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Sementara Thailand mengajarkan Budhisme di sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran wajib. Sedangkan Amerika mengatur pendidikan kewargaan dalam kurikulum ilmu sosial selama satu tahun dan diserahkan pelaksanaannya kepada negara-negara bagian.³⁴

Kesejatian pendidikan Kewarganegaraan mengandung nilai-nilai luhur yang bersifat universal berkaitan antara warga negara,

³⁴ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan*, hal. 11-12

individu dengan *government*, hak dan kewajiban warga negara, hukum, demokrasi, partisipasi, dan kesiapan sebagai warga negara dunia. Ketika dunia pendidikan mengajarkan makna cinta tanah air, nasionalisme atau nilai-nilai komitmen menjadi warga negara yang kuat lahir dan batin, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya yang diapresiasi oleh ajaran Islam. Disebutkan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 9³⁵:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. Ayat di atas mengingatkan tentang pentingnya pendidikan supaya umat muslim tidak meninggalkan anak didiknya dalam keadaan lemah, tidak terdidik, dan tidak berkepribadian yang luhur. Sehingga penting adanya pendidikan, salah satunya pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada upaya untuk menjadikan warga negara yang baik.

³⁵ Hairus, “Perspektif Islam Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan”, dalam *Jurnal Politeknik Negeri Malang*, www.researchgate.net/publication, 2015, hal.3-5

e. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara programatik, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk kualitas kepribadian yang baik bagi warga negara.³⁶ Kriteria warga negara yang baik dapat dilihat dari beberapa kualitas kepribadian sebagai perwujudan dari potensi yang melekat pada diri seorang warga negara. Menurut Stanley E. Dimond, deskripsi kualitas kepribadian warga negara yang baik meliputi beberapa atribut yaitu loyal, orang yang selalu belajar, seorang pemikir, bersikap demokratis, gemar melakukan tindakan kemanusiaan, pandai mengatur diri, dan seorang pelaksana.³⁷

Senada dengan itu, Cogan menegaskan bahwa warga negara yang baik harus memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan global, bekerjasama dengan orang lain, menerima dan toleransi terhadap perbedaan budaya, berpikir kritis dan sistematis, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, mengubah gaya hidup konsumtif guna melindungi lingkungan, kepekaan terhadap hal azasi manusia, serta partisipasi dalam pemerintahan lokal, nasional dan global.³⁸

f. Tantangan Global

Konsep *civics* memuat pola hubungan warga negara yang bersifat publik yang berarti menjadi anggota dari *political*

³⁶ Suparlan Al Hakim, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Konteks Indonesia*, (Malang: Madani, 2014), hal. 9-11

³⁷ *Ibid.*, hal. 9-10

³⁸ *Ibid.*, hal. 11

community. Komunitas politik mencakup seluruh bidang kehidupan warga negara, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Hubungan tersebut akan berjalan dengan baik jika warga negara mampu menjaga eksistensi negaranya di tengah tantangan patologi sosial di dunia, seperti ³⁹:

- 1) Hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat.
- 2) Memudarnya kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas.
- 3) Kemerostan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat.
- 4) Memudarnya nilai-nilai kejujuran, kesopanan, dan rasa tolong-menolong.
- 5) Melemahnya nilai-nilai dalam keluarga.
- 6) Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 7) Kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi.
- 8) Pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan.

g. Demokrasi Politik

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat

³⁹ Fatahillah, *Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Belajar di Perguruan Tinggi*, dalam *modul Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Muhammadiyah Pringsewu*, 2010, hal. 5

menentukan.⁴⁰ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan/ pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.⁴¹

Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota/ negara kota. Dari kata polis berkembang konsep *polites* yang bermakna warga negara dan konsep *politikos* yang berarti kewarganegaraan. Sehingga secara etimologis, politik sebagai sesuatu yang berhubungan antara warga negara pada suatu negara kota. Politik dalam bahasa Inggris yaitu *politics*, yang berarti bijaksana. Dari kedua akar kata yang berbeda tersebut, maka secara etimologis dapat dipahami bahwa politik sebagai suatu proses dan sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan warga negara dalam suatu negara kota.⁴²

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu program pendidikan politik memiliki fokus studi yaitu demokrasi politik. Henry B. Mayo mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip

⁴⁰ Srijanti, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 47

⁴¹ Menteri Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 337

⁴² P. Antonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.5-6

kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁴³ Pada hakikatnya demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.⁴⁴ Dengan kata lain, demokrasi terbagi menjadi tiga hal mendasar yaitu:

- 1) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)
- 2) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)
- 3) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)

Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama dapat dijalankan. Menurut Nurcholish Madjid, pandangan hidup demokratis dapat bersandar pada bahan yang telah berkembang di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan.⁴⁵ Peran organisasi masyarakat sangat penting dalam negara demokrasi. Hal ini dalam menjaga stabilitas negara demokrasi dari manipulasi lembaga negara dan ketika demokrasi disalahartikan serta disalahgunakan oleh kelompok masyarakat lainnya. Lebih lanjut Henry menyebutkan nilai yang mendasari demokrasi yaitu⁴⁶:

⁴³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 13

⁴⁴ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 67-68

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 69-71

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 13

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan seminimal mungkin.
- 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
- 6) Menjamin tegaknya keadilan.

h. Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Hasil penelitian yang ada mengarahkan bangsa-bangsa untuk mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fundamental yang dianut bangsa yang bersangkutan. Secara umum, negara-negara Asia menekankan aspek moral (karakter individu), kepentingan komunal, identitas nasional, dan perspektif internasional. Sementara Amerika dan Australia menekankan pentingnya hak dan tanggung jawab individu serta sistem dan proses demokrasi, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar.⁴⁷

Dengan demikian, melihat konsep kewarganegaraan secara universal berkaitan dengan patologi sosial dunia, maka materi

⁴⁷ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan*, hal. 12

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) perlu dikembangkan sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Pengembangan nilai-nilai demokratis.
 - 2) Pengembangan kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas (*civic values and community values*).
 - 3) Pengembangan pemerintahan yang bersih (*clean good governance*).
 - 4) Pembentukan identitas nasional (*national identity*)
 - 5) Pengembangan ikatan sosial (*social cohesion*) dan keberagaman (*diversity*).
 - 6) Pengembangan kehidupan pribadi (*self-cultivation*).
 - 7) Pengembangan kehidupan ekonomi (*economic life*).
 - 8) Pengembangan nilai-nilai keluarga (*family values*).
- i. Nilai-Nilai Pendidikan Kewarganegaraan

Beberapa negara mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan yang hampir sama. Misalnya, Amerika mengembangkan nilai kewarganegaraan kedalam delapan bentuk nilai yaitu sikap saling menghargai, saling mencintai sesama manusia, kejujuran atas bersikap apa adanya terhadap sesama warga, kesportifan dalam bergaul di antara sesama warga, kemurahhatian atau selalu ringan membantu warga yang lemah dan memerlukan bantuan, kerja keras atau mendapatkan

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 14

kemakmuran dengan bekerja keras menurut norma-norma yang berlaku, toleransi atau menahan diri terhadap perbedaan, dan kebebasan.

Sedangkan di Australia dikembangkan sepuluh prinsip *civic values* yaitu toleransi, saling menghargai dan menghormati, tanggung jawab, keadilan sosial, berusaha mendapatkan sesuatu yang baik secara individual atau kelompok, peduli terhadap sesama, *inclusion and trust*, kejujuran, kebebasan dan bertindak sesuai aturan.⁴⁹

Pada konteks negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya hak-hak dasar dan kepentingan rakyatnya. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut dengan istilah konstitusi.⁵⁰ Adapun berikut prinsip-prinsip hak asasi dan politik pemerintahan dalam Piagam Madinah⁵¹:

- 1) Prinsip umat
- 2) Prinsip persatuan dan persaudaraan
- 3) Prinsip persamaan
- 4) Prinsip kebebasan

⁴⁹ Alim Roswanto, "Civic Values dan Islam: Islam Awal dan Potret Pembangunan Civil Society", dalam *jurnal Ilmu Ushuluddin Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 10 No. 1 (Januari, 2011), hal. 25-26

⁵⁰ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 64

⁵¹ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hal. 143-304

- 5) Prinsip hubungan antar pemeluk agama
- 6) Prinsip pertahanan
- 7) Prinsip hidup bertetangga
- 8) Prinsip tolong-menolong dan membela yang lemah dan teraniaya
- 9) Prinsip perdamaian
- 10) Prinsip musyawarah
- 11) Prinsip keadilan
- 12) Prinsip pelaksanaan hukum
- 13) Prinsip kepemimpinan
- 14) Prinsip ketakwaan, amar makruf dan nahi munkar.

3. Sejarah Kebudayaan Islam

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) menekankan pada kemampuan mengambil ibrah/ hikmah (pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain, untuk mengembangkan Kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan masa yang akan datang.⁵²

Ibnu Chaldun, menerjemahkan bahwa sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang segala perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu, tentang revolusi dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan

⁵² Surat Keputusan Direktur Jenderal, hal. 44

golongan yang lain dengan akibat timbulnya kerajaan-kerajaan dan negara-negara dengan tingkat bermacam-macam.⁵³ Kebudayaan adalah cara berfikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam keseluruhan segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu.⁵⁴ Sedangkan kebudayaan Islam merupakan perpaduan dari kebudayaan lama dan baru, yang antara keduanya saling menopang, saling menutupi bahkan saling mengubah.⁵⁵

Dengan demikian, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam beribadah, bermuamalah dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupan atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi oleh akidah.⁵⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁵⁷

⁵³ Maman A. Malik Sy, dkk, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Suka, 2005), hal. 5-6

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 10

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 14

⁵⁶ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah*, (Jakarta: Menteri Agama RI, 2014), hal. 37

⁵⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 3

Data penelitian diambil dari berbagai literatur (buku, artikel, internet dan lain sebagainya). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, dimana penekanan hasil penelitian adalah dengan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti untuk kemudian diinterpretasikan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *content analysis* (analisis isi). Analisis isi adalah telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data.⁵⁸ Analisis ini sangat berguna dalam menambah pengetahuan penting mengenai suatu bidang studi atau menghasilkan informasi yang berguna untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktek-praktek sosial atau pendidikan.⁵⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan ini bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film,

⁵⁸ John W. Best, *Metodologi Penelitian Dan Pendidikan, Yang Diterjemahkan Oleh Sanapiah Faisal Dan Mulyadi Guntur Waseso*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 133

⁵⁹ Ibid., hal 135

catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya dengan naskah yang otentik untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi.⁶⁰

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah buku siswa mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah kelas X. Buku tersebut dikarang oleh Miftachul Ula, Maria Ulfa, dan M. Husein Tuanaya dengan judul buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X. Buku ini merupakan cetakan pertama. Buku tersebut diterbitkan di Jakarta oleh Kementerian Agama pada tahun 2014.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah berupa karya-karya lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder diambil dari berbagai sumber, seperti dari buku, surat kabar, baik online maupun cetak, dan beberapa dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian skripsi ini. Beberapa sumber sekunder yang peneliti gunakan diantaranya *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah*; buku yang berjudul

⁶⁰ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode Dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 152-153

Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW Jilid 2 karya Moenawar Chalil, buku yang berjudul *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah SAW (Sifat dan Organisasi Yang Dimilikinya) Jilid 1* karya Akram Diya Al ‘Umari, buku yang berjudul *Negara Hukum: Suatu studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* karya Muhammad Tahir Azhary, buku Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan terjemahan yang ditulis oleh Robertus Robet dan Hendrik Boli Tobi; buku yang ditulis oleh Winarno dengan judul *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*, serta buku yang berjudul *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia* yang ditulis oleh Sobirin Malian dan Suparman Marzuki.

4. Analisis data

Metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.⁶¹ Pada dasarnya, istilah analisis isi hanya mengacu pada metode yang memusatkan perhatian pada aspek isi teks yang bisa diperhitungkan dengan jelas dan langsung.⁶² Di sini

⁶¹ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 175

⁶² Stefan Titscher, dkk, *Metode Analisis Teks & Wacana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 93

peneliti menggunakan bahan ajar berupa buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam Kelas X kurikulum 2013 sebagai obyek penelitian.

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis obyek penelitian yang berupa buku pelajaran tersebut, peneliti menggunakan tolak ukur (indikator) sebagai pedoman untuk menganalisis data-data yang digunakan yang bertujuan untuk mengetahui kandungan pendidikan kewarganegaraan dalam buku siswa SKI MA kelas X, bermuatan pokok pembahasan berupa materi dan unsur pendidikan kewarganegaraan. Proses analisis isi ini terdiri dari sembilan tahapan sebagai berikut:⁶³

- a. Penentuan materi.
- b. Analisis situasi tempat asal teks.
- c. Pengarakteran materi secara formal.
- d. Penentuan arah analisis.
- e. Diferensiasi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan teori yang ada.
- f. Penyeleksian teknik-teknik analitis (ringkasan, eksplikasi, penataan).
- g. Pendefisian unit-unit analisis.
- h. Analisis materi.
- i. Interpretasi

⁶³ *Ibid.*, hal. 108

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman Judul, halaman Surat Pernyataan, halaman Persetujuan Pembimbing, halaman Pengesahan, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Selanjutnya untuk bagian inti terdiri dari bagian pendahuluan sampai dengan bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai kesatuan. Pada skripsi ini, peneliti menuangkan hasil penelitian dalam empat bab. Dimulai dari bab 1 yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang deskripsi kompetensi inti dan kompetensi dasar buku pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas X, struktur penerapan kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta deskripsi materi-materi dalam buku pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas X.

Bab III berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu analisis yang membahas mengenai nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam materi buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam pada jenjang Madrasah Aliyah.

Adapun bagian terakhir dari bagian inti adalah bab IV, bagian ini disebut bagian penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Akhirnya, pada bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran yang terkait dengan penelitian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Kurikulum Madrasah Aliyah Kelas X Kurikulum 2013

Kedudukan Sejarah Kebudayaan Islam yaitu sebagai struktur kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dalam kurikulum Madrasah Aliyah. Sejarah Kebudayaan Islam diartikan sebagai catatan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam beribadah, bermuamalah, dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupan atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi oleh akidah. Secara substansial, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati Sejarah Kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Sedangkan karakteristik Sejarah Kebudayaan Islam itu lebih menekankan pada kemampuan mengambil *ibrah* atau hikmah (pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain, untuk mengembangkan Kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan masa yang akan datang.

Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X disusun oleh Miftachul Ula, Maria Ulfa, dan M. Husein Tuanaya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Indonesia ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 000912 tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.

Adapun kelebihan dari buku tersebut yaitu buku siswa tersebut telah menyampaikan isi materinya cukup komunikatif untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Nilai-nilai kewarganegaraan yang terkandung di dalamnya dapat dilihat baik secara eksplisit maupun implisit dengan beberapa contoh yang cukup jelas, perumusan judul bab dan sub bab sudah sesuai, memiliki peta konsep yang membantu siswa untuk membaca materi apa yang akan dipelajari, dan adanya petunjuk penyelesaian soal-soal serta evaluasinya telah memenuhi aspek sikap, kognitif dan psikomotorik.

Sedangkan kekurangan dari buku tersebut adalah dalam penggunaan bahasa untuk menyampaikan pesan nilai yang ada di dalamnya beberapa di antaranya kurang tepat. Sehingga ada beberapa kalimat yang menurut peneliti kurang dapat diterima pesan yang disampaikan oleh buku tersebut. Selain itu, sistematika penulisannya kurang sesuai dengan EYD. Misalnya dalam penggunaan tanda baca, penggunaan kata baku, pemenggalan kata

serta kalimat terlalu panjang sehingga memengaruhi pemahaman peserta didik dalam menerima pesan yang disampaikan oleh buku siswa tersebut, adanya kesalahan dan kekurangan dalam perumusan Kompetensi Dasar, dan adanya kerancuan dalam menuliskan Kompetensi Dasar mempengaruhi isi materi yang disampaikan, serta sedikit petunjuk untuk siswa dapat mengambil ibrah atau hikmah dari setiap kejadian dalam isi materinya.

2. Nilai-Nilai Pendidikan Kewarganegaraan yang termuat dalam Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X Kurikulum 2013

Nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan diambil dari Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam sarat akan nilai-nilai dalam kehidupan individu maupun kelompok berupa kehidupan kewargaan, komunitas, ikatan sosial dan keberagaman. Dari pembahasan di bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam “Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X” terdapat sejumlah redaksi di bab kedua hingga bab kelima yang mengandung Pendidikan Kewarganegaraan.

Pada bab kedua terdapat beberapa nilai Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu nilai religius, nilai keadilan, nilai persamaan, nilai kekeluargaan, nilai persatuan dan persaudaraan, nilai kebebasan, nilai pertahanan dan keamanan, nilai kepemimpinan, nilai kesejahteraan, nilai tolong-menolong dan membela yang lemah, nilai penegakan hukum dan nilai kejujuran.

Pada bab ketiga terdapat beberapa nilai Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu nilai religius, nilai musyawarah, nilai keadilan, nilai persamaan, nilai kekeluargaan, nilai persatuan dan persaudaraan, nilai kebebasan, nilai pertahanan dan keamanan, nilai perdamaian, nilai kepemimpinan, nilai kesejahteraan, nilai tolong-menolong dan membela yang lemah, nilai penegakan hukum dan nilai kejujuran.

Pada bab keempat terdapat beberapa nilai Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu nilai musyawarah, nilai pertahanan dan keamanan, nilai kepemimpinan, dan nilai kesejahteraan.

Dan pada bab kelima terdapat nilai Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu nilai pertahanan dan keamanan, nilai kepemimpinan, nilai kesejahteraan, dan nilai penegakan hukum.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian tentang nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Kelas X, ada beberapa saran yang penyusun sampaikan, yaitu:

1. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam selama ini dianggap hanya sebagai mata pelajaran yang mempelajari nama tokoh, tahun peristiwa penting dan lain-lain. Padahal, di dalam sejarah Islam memuat banyak nilai yang mendasar dan fundamental untuk diambil dan dipelajari sebagai hikmah atau pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, dalam pembelajarannya, hal yang paling penting dari mempelajari

sejarah yaitu bagaimana peserta didik dapat mengambil hikmah atau pelajaran bagi dirinya sendiri yang kemudian dapat dimanifestasikan dalam kehidupannya sehari-hari.

2. Bagi siswa/ peserta didik Madrasah Aliyah atau sederajat hendaknya dapat merubah pandangan di atas dan mulai memahami bahwa mempelajari sejarah penting untuk diambil hikmahnya dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Bagi pendidik Pendidikan Agama Islam hendaknya dapat menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dan menekankan pada pengambilan ibrah atau pelajaran hidup dari materi pembelajaran, khususnya Sejarah Kebudayaan Islam. Serta dapat memberikan asumsi dasar tentang sejarah Islam dalam pandangan yang lebih luas, yang tidak hanya berupa nama tokoh, waktu kejadian, tempat kejadian dan lain sebagainya.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya, salawat serta salam tidak lupa pula peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dari berbagai pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Nilai-Nilai Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X Kurikulum 2013”.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Atas partisipasi dan bantuan semua pihak, kami sampaikan terimakasih.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, Suparlan. Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Konteks Indonesia*, Malang: Madani, 2014.
- Al ‘Umari, Akram Diya (ed), *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah SAW (Sifat dan Organisasi Yang Dimilikinya) Jilid 1*, Jakarta: Media Dakwah, 1994.
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan: Metode Dan Paradigma Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- , *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Best, John W, *Metodologi Penelitian Dan Pendidikan, Yang Diterjemahkan Oleh Sanapiah Faisal Dan Mulyadi Guntur Waseso*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Cairo, Jemil Firdaus, “Refleksi Piagam Madinah; Nilai-Nilai Toleransi dan Hak Asasi Manusia”, dalam *www.kompasiana.com*, diakses pada 29 April 2017 pukul 13.40 WIB.
- Chalil, Moenawar, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Danuji, Ahmad, “Pemikiran Wahid Hasyim Tentang Islam Dan Kewargaan”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Draf Dikti-MKWU, *Pedoman Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)*, Jakarta: Dirjen Dikti, 2014.
- Edukasi PPKn, “Integrasi Nasional”, *www.edukasippkn.com* dalam yahoo.com, 2016
- Erwin, Muhamad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
2014



Buku Siswa

SEJARAH KEBUDAYAAN

ISLAM

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013



Madrasah Aliyah

X



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat :Jl. Marsda Adisucipto,Telp. (0274) 513056, Fax (0274) 519734
Webite: <http://tarbiyah.uin-suka.ac.id>, Yogyakarta 55281

BUKTI SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Pratika Nur Ziatin
Nomor Induk : 13410168
Jurusan : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Semester : VII
Tahun Akademik : 2016/2017
Judul Skripsi : INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DALAM BUKU SISWA SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
MADRASAH ALIYAH KELAS X KURIKULUM 2013

Telah mengikuti seminar riset tanggal : 24 Januari 2017

Selanjutnya, kepada Mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembimbing berdasarkan hasil-hasil seminar untuk penyempurnaan proposal lebih lanjut.

Yogyakarta, 24 Januari 2017

Moderator


Drs. Rofik, M.Ag

NIP. 19650405 199303 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 513056, Fax (0274) 519734
Website: <http://tarbiyah.uin-suka.ac.id>, Yogyakarta 55281

Nomor : B- 10 /UIN.02/PS.PAI/PP.05.3/ 01 /2017
Lampiran : 1 (Satu) jilid proposal
Perihal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

18 Januari 2017

Kepada Yth. :

Bapak Drs. Rofik, M.Ag

Dosen Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil rapat pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2017 perihal pengajuan Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Tahun Akademik 2015/2016 setelah proposal tersebut dapat disetujui Fakultas, maka Bapak/Ibu telah ditetapkan sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama : Pratika Nur Ziatin

NIM : 13410168

Jurusan : PAI

Judul : INTEGRASI NILA-NILAI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
BUKU SISWA SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM MADRASAH ALIYAH
KELAS X KURIKULUM 2013

Demikian agar menjadi maklum dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

an. Dekan
Ketua Jurusan PAI

Rofik

Tembusan dikirim kepada yth :

1. Arsip ybs.



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama mahasiswa : Pratika Nur Ziatin
NIM : 13410168
Pembimbing : Drs. H. Rofik, M.Ag.
Judul : Nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Buku Siswa Sejarah
Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas X Kurikulum 2013
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan/Program Studi : Pendidikan Agama Islam

No.	Tanggal	Konsultasi ke :	Materi Bimbingan	Tanda tangan Pembimbing
1	20 Januari 2017	1	Konsultasi Proposal	
2	24 Januari 2017	2	Seminar Proposal	
3	2 Februari 2017	3	Pengajuan BAB I	
4	02 Maret 2017	4	Pengajuan Bab II	
5	21 April 2017	5	Revisi Bab II dan Pengajuan Bab III	
6	09 Mei 2017	6	Revisi Bab III dan Pengajuan Bab IV	
7	12 Mei 2017	7	Halaman-halaman formalitas	
8	17 Mei 2017	8	ACC Skripsi	

Yogyakarta, 17 Mei 2017
Pembimbing

Drs. H. Rofik, M.Ag.
NIP.19650405 199303 1 002



Nomor: UIN.02/R.1/PP.00.9/2752.a/2013

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : PRATIKA NUR ZIATIN
NIM : 13410168
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2013/2014
Tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2013 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2013

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.
NIP. 19591218 197803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 519734
Website: <http://tarbiyah.uin-suka.ac.id> YOGYAKARTA 55281

SERTIFIKAT

Nomor : B.2065.a/Un.02/WD.T/PP.02/05/2016

Diberikan kepada

Nama : PRATIKA NUR ZIATIN
NIM : 13410168
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
Nama DPL : Dr. Muqowim, M.Ag.

yang telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan/Magang II tanggal 27 Februari s.d 27 Mei 2016 dengan nilai:

94.50 (A-)

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti lulus Magang II sekaligus sebagai syarat untuk mengikuti Magang III.

Yogyakarta, 27 Mei 2016

a.n Wakil Dekan Bidang Akademik
Ketua,

Adhi Setivawan, M.Pd.
NIP. 19800901 200801 1 011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://tarbiyah.uin-suka.ac.id>, Email: ftk@uin-suka.ac.id YOGYAKARTA 55281

Sertifikat

Nomor: B.3094/Un.02/WD.T/PP.02/09/2016

Diberikan kepada

Nama : PRATIKA NUR ZIATIN
NIM : 13410168
Jurusan/Pogram Studi : Pendidikan Agama Islam

yang telah melaksanakan kegiatan Magang III tanggal 20 Juni sampai dengan 8 Agustus 2016 di SMP N 1 Pleret Bantul dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Mujahid, M.Ag. dan dinyatakan lulus dengan nilai **95.10 (A)**.

Yogyakarta, 2 September 2016

a.n Wakil Dekan I,
Ketua Laboratorium Pendidikan

Adhi Setiyawan
NIP. 19800901 200801 1 011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

سنة الله العزيم

SERTIFIKAT 148

Nomor: B-420.1/UIN.02/L.3/PM.03.2/P5.159/12/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga
memberikan sertifikat kepada:

Nama : Pratika Nur Ziatin
Tempat, dan Tanggal Lahir : Pacitan, 07 Oktober 1993
Nomor Induk Mahasiswa : 13410168
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Gasal,
Tahun Akademik 2016/2017 (Angkatan ke-91), di:

Lokasi : Patuk, Patuk
Kecamatan : Patuk
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 05 Juni s.d. 30 November 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,20 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) dengan status matakuliah intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian
Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 05 Desember 2016
Ketua,

Dr. Phil. Ai Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.41.1.1/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Pratika Nur Ziatin :

تاريخ الميلاد : ٧ أكتوبر ١٩٩٣

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٣٠ مايو ٢٠١٧، وحصلت
على درجة :

٤٣	فهم المسموع
٤٣	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٦	فهم المقروء
٤٠٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALJAGA
YOGYAKARTA

جوكجاكرتا، ٣٠ مايو ٢٠١٧

الأستاذ

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ág.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥

١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.41.12.6/2017

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Pratika Nur Ziatin**
Date of Birth : **October 07, 1993**
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **April 13, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	41
Structure & Written Expression	37
Reading Comprehension	43
Total Score	403

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, April 13, 2017
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada
Nama : PRATIKA NUR ZIATIN
NIM : 13410168
Fakultas : ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jurusan/Prodi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	95	A
2.	Microsoft Excel	90	A
3.	Microsoft Power Point	95	A
4.	Internet	90	A
5.	Total Nilai	92.5	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	



Yogyakarta, 22 Maret 2016
Kepala PTIPD
Agung Fatwanto, Ph.D.
19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

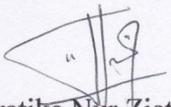
1. Nama : Pratika Nur Ziatin
2. TTL : Pacitan, 07 Oktober 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Orang Tua : a. Ayah : Prayitno
b. Ibu : Mujiatin
6. Alamat Asal : RT. 02/RW. 03, Dusun Jenggrik, Desa Gayuhan,
Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Jawa Timur
7. Contact Person : 082323242166
8. E-mail : tika_nzia@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Gayuh Putra (1998-2000)
2. SD Negeri Gayuhan 1 (2000-2006)
3. SMP Negeri 1 Arjosari (2006-2009)
4. SMK Negeri 2 Pacitan (2009-2012)
5. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2017)

Demikian riwayat hidup ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Mei 2017


Pratika Nur Ziatin

- Fatahillah, "Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Belajar di Perguruan Tinggi", dalam modul *Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Muhammadiyah Pringsewu*, 2010.
- Hadi, Amirul dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Hairus, "Perspektif Islam Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan", dalam *Jurnal Politeknik Negeri Malang*, www.researchgate.net/publication, 2015.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Juliardi, Budi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kresna, Aryaning Arya, dkk, *Etika dan Tertib Hidup Berwarga Negara: Sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Lestari, Ika, *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi: Sesuai Dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Padang: Akademia Permata, 2013.
- Lubis, Saidan, "Perpaduan Hard Skill dan Soft Skill Dalam Kegiatan Diklat Teknis Fungsional Guru Mapel Bahasa Arab", dalam www.bkdpadang.kemenag.go.id, diakses pada 12 Juni 2017 pukul 20.03 WIB
- Maksudin, *Pendidikan Nilai Komprehensif: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: UNY Press, 2009.
- Malian, Sobirin dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Menteri Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Nawawi, Handari, *Pendidikan Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Nizhomi, Bestiana, "Integrasi *General Life Skill* dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V Di MIN Jejeran Bantul Yogyakarta". *Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga*, 2014.

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014.
- Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta: Kemendikbud RI, 2013.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 Tentang Buku Teks Pelajaran*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2005.
- Prasetya, Eka, "Pendidikan politik dalam buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah kelas X kurikulum 2013". *Skripsi* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Pulungan, Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Robet, Robertus dan Hendrik Bali Tobi, *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan: Dari Marx Sampai Agamben*, Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 2014.
- Rofik, "Nilai Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Dalam Kurikulum Madrasah", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. XII No. 1, Juni 2015.
- Rofik dan Wiji Hidayati, *Telaah Kurikulum Sejarah Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Suka, 2009.
- Roswanto, Alim, "Civic Values dan Islam: Islam Awal dan Potret Pembangunan Civil Society", dalam *Jurnal Ushuluddin Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 10 No. 1, Januari 2011.
- Samsuri, "Diktat Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan", dalam *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*, 2008.
- Sitepu, P. Anthonius, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soeprapto, "Prinsip dan Nilai Pancasila", dalam *www.lppkb.wordpress.com*, September 2005, diakses pada 1 Mei 2017 pukul 07.48.
- Srijanti, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- , Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk, Jakarta: UII Press, 1995.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2676 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2013), edisi revisi 16 Juni 2014.
- Sy, Maman A. Malik, dkk, Pengantar Sejarah Kebudayaan Islam, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Suka, 2005
- Titscher, Stefan, dkk, *Metode Analisis Teks & Wacana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Ula, Miftachul, dkk, *Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah Kelas X*, Jakarta: Kemenag RI, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Wiyani, Novan Ardy, *Desain Pembelajaran Pendidikan: Tata Rancang Pembelajaran Menuju Pencapaian Kompetensi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Zaidan, Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984.
- Zain, Muhammad, *Pendidikan Islam Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1987.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.